

Penerapan Strategi *Soft Balancing* Ukraina sebagai Respon atas Agresi Militer Rusia sejak 2022

Yohanes Nainggolan^{1*}, Pujo Widodo², Djayeng Tirto Soedarmono³, Anang Puji Utama⁴

*Corresponding Author: yohanesngln@gmail.com

^{1,2,3,4}Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v10i1.31968

Abstract

This article aims to describe Ukraine's response to Russia's military attacks since February 2022 through the implementation of a soft balancing strategy. Various previous studies about Russo-Ukrainian conflict have focused on analyzing the actions taken by Russia. Meanwhile, several other studies emphasize the causes of the conflict, or the international response in general. So far, there is little literature that specifically discusses Ukraine's response, especially the strategies implemented in responding to Russia's military attacks. Therefore, by focusing on the implementation of the soft-balancing strategy carried out by Ukraine, this paper attempts to fill the gap in previous studies related to the Russia-Ukraine conflict. This study uses the concept of soft balancing as an analytical framework. The research method used in this study is a qualitative method with a discourse analysis approach, with primary and secondary data collection through literature studies. The results of this study indicate that in responding to the military attacks launched by Russia since February 2022, Ukraine implemented a soft balancing strategy, both military and non-military, which can be seen from the application for arms assistance to NATO, requests for political support from NATO and Western countries, and the implementation of a non-cooperation strategy.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan menguraikan respon Ukraina terhadap agresi militer Rusia sejak Februari 2022 melalui penerapan strategi soft balancing. Berbagai riset terdahulu mengenai konflik Rusia-Ukraina banyak berfokus dalam menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Rusia. Sementara itu beberapa riset lain menekankan pada penyebab konflik atau respons internasional secara umum. Sejauh ini, hanya sedikit literatur yang secara spesifik membahas respon Ukraina, khususnya pada strategi yang diterapkan dalam menanggapi serangan militer Rusia. Oleh karena itu, dengan berfokus pada penerapan strategi soft-balancing yang dilakukan oleh Ukraina, tulisan ini berupaya mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya terkait konflik Rusia-Ukraina. Penelitian ini menggunakan konsep soft balancing sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan pendekatan analisis wacana, dengan pengumpulan data primer maupun sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam merespon serangan militer yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022, Ukraina menerapkan strategi soft balancing, baik yang bersifat militer maupun non-militer, yang dapat dilihat dari pengajuan bantuan persenjataan pada NATO, permintaan dukungan politik pada NATO dan negara-negara Barat, serta penerapan strategi non-kooperasi.

Keywords

Agresi Militer, NATO, Rusia, Soft Balancing, Ukraina.

Article History

Received January, 20,

Revised May, 31

Accepted June 28

Published June 30

Corresponding Author

Yohanes Nainggolan,
Program Studi Damai dan
Resolusi Konflik, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia
Kawasan IPSC Sentul,
Sukahati, Kec. Citeureup,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat
16810.

Pendahuluan

Konflik antara Rusia dan Ukraina yang memuncak pada tahun 2022 telah menarik perhatian dunia internasional dan memengaruhi stabilitas keamanan global. Peristiwa ini mencapai titik krusial pada 24 Februari 2022, ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina, menandai babak baru dalam konflik yang telah berlangsung sejak 2014. Eskalasi ini menjadi salah satu tindakan militer paling signifikan di Eropa sejak Perang Dunia II, menciptakan tantangan besar tidak hanya bagi kedua negara yang terlibat tetapi juga bagi komunitas internasional secara keseluruhan (Bilefsky et. al, 2022). Invasi tersebut telah mengakibatkan dampak multidimensi, meliputi kehancuran infrastruktur, kehilangan ribuan nyawa, dan munculnya krisis pengungsi dalam skala besar yang menuntut respons cepat dari berbagai aktor global.

Salah satu dampak paling mencolok dari invasi ini adalah kehancuran infrastruktur penting di Ukraina. Fasilitas transportasi, rumah sakit, jaringan listrik, dan bangunan tempat tinggal menjadi sasaran serangan, menyebabkan kerugian material yang sangat besar. Di samping itu, konflik ini telah mengakibatkan trauma psikologis bagi jutaan warga sipil, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan militer. Invasi ini menciptakan gelombang pengungsi yang luar biasa, dengan jutaan orang meninggalkan negara mereka untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga seperti Polandia, Rumania, dan Hungaria. Situasi tersebut memicu krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan Eropa Timur (Oktorino, 2022).

Selain itu, invasi Rusia juga membawa dampak signifikan pada perekonomian global. Sebagai salah satu negara pengekspor energi terbesar di dunia, Rusia menghadapi berbagai sanksi ekonomi dari negara-negara Barat, termasuk pembatasan ekspor minyak dan gas. Langkah ini memicu kenaikan harga energi di seluruh dunia dan memberikan tekanan tambahan pada perekonomian global yang sudah rapuh akibat pandemi COVID-19. Di sisi lain, Ukraina sebagai salah satu eksportir utama gandum dan komoditas pertanian lainnya, mengalami disrupsi produksi dan distribusi, yang berdampak pada ketahanan pangan di banyak negara, terutama di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Dengan kata lain, konflik ini tidak hanya menjadi masalah regional tetapi juga isu global yang memengaruhi berbagai sektor kehidupan (Bilefsky et. al, 2022).

Situasi tersebut mendorong *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), sebagai aliansi pertahanan terbesar di dunia, untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam mendukung Ukraina. Dukungan ini mencakup pengiriman bantuan militer, termasuk senjata dan pelatihan bagi tentara Ukraina, serta sanksi ekonomi yang dirancang untuk melemahkan kemampuan Rusia melanjutkan operasi militernya. Selain itu, NATO juga memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur untuk memberikan rasa aman kepada negara-negara anggota yang berbatasan langsung dengan Rusia (Pradana & Ramadhoan, 2022). Bantuan yang diberikan oleh NATO dan sekutunya kepada Ukraina telah memainkan peran penting dalam memperpanjang kemampuan Ukraina untuk bertahan melawan agresi Rusia. Namun, keterlibatan ini juga meningkatkan risiko eskalasi konflik menjadi perang yang lebih luas, dengan potensi dampak yang sulit diprediksi (Oktorino, 2022).

Dari perspektif Rusia, invasi ini dianggap sebagai upaya untuk melindungi kepentingan nasional mereka, khususnya terhadap ekspansi NATO di kawasan Eropa Timur. Pemerintah

Rusia, di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin, telah lama menyatakan keprihatinannya terhadap pengaruh NATO yang semakin mendekati perbatasan Rusia (Patbnaik, 2020). Dalam narasi resmi Kremlin, tindakan militer ini dipandang sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa Ukraina tidak menjadi anggota NATO, yang dapat menghadirkan ancaman strategis bagi Rusia. Selain itu, Rusia juga mengklaim memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok etnis Rusia di Ukraina Timur, khususnya di wilayah Donetsk dan Luhansk, yang telah menjadi zona konflik sejak 2014 (Pradana & Aidelah, 2022).

Meskipun demikian, tindakan Rusia telah menuai kecaman luas dari komunitas internasional. Invasi ini dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk kedaulatan dan integritas wilayah suatu negara. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadakan sejumlah pertemuan darurat untuk membahas konflik ini, meskipun belum ada resolusi yang dapat diimplementasikan secara efektif karena adanya veto dari Rusia sebagai anggota tetap. Di sisi lain, negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah bersatu untuk memberikan tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Rusia, sekaligus meningkatkan dukungan kepada Ukraina sebagai upaya untuk mempertahankan tatanan internasional yang berbasis aturan (Gultom dkk, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu tentang konflik Rusia-Ukraina banyak berfokus dalam menganalisa tindakan yang dilakukan oleh Rusia, seperti penerapan strategi deterens (Amal dkk, 2022) konfrontatif (Pradana & Adielah, 2022), hingga perang hibrida (Setiyono, 2024). Sementara itu beberapa riset lain menekankan pada analisis penyebab terjadinya serangan militer Rusia ke Ukraina (Putra dkk., 2023), penyebab kegagalan PBB dalam menangani konflik tersebut (Gultom dkk, 2024), hingga upaya Ukraina dalam merespon serangan Rusia (Dila dkk, 2024). Berdasarkan tinjauan berbagai literatur sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar penelitian berfokus pada perspektif Rusia, penyebab konflik, atau respons internasional secara umum. Hanya sedikit yang secara spesifik membahas respon Ukraina, khususnya pada strategi yang diterapkan dalam menanggapi serangan militer Rusia. Satu-satunya literatur yang berfokus pada respon Ukraina lebih menekankan pada penggambaran upaya memperkuat solidaritas nasional dan pencarian dukungan internasional. Meskipun demikian, literatur tersebut hanya memaparkan gambaran umum respon Ukraina dan belum secara spesifik menguraikan jenis strategi yang diterapkan oleh Ukraina. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian-penelitian sebelumnya terkait konflik Rusia-Ukraina, dengan berfokus pada penerapan strategi soft-balancing yang dilakukan oleh Ukraina.

Kerangka Konseptual

Guna menguraikan strategi soft-balancing Ukraina, tulisan ini menggunakan konsep soft-balancing sebagai kerangka analisis. Keberadaan konsep soft balancing tidak dapat dilepaskan dari teori Aliansi yang dirumuskan oleh Stephen M. Walt. Dalam karya yang ia tulis, Walt (1985) menyebutkan bahwa negara-negara yang merasa terancam oleh kekuatan atau tindakan negara lain dapat memilih dua strategi utama, yaitu balancing atau bandwagoning. Balancing mengacu pada tindakan negara-negara yang memperkuat kapabilitas mereka sendiri atau membentuk aliansi dengan aktor lain untuk melawan atau mengimbangi ancaman yang ada. Dalam konteks ini, negara berusaha menciptakan keseimbangan kekuatan untuk menjaga keberlangsungan kedaulatannya. Sementara itu Bandwagoning ialah tindakan di mana negara

yang terancam justru memilih untuk mendekati negara yang menjadi sumber ancaman (Walt, 1985). Dalam penelitian ini, Balancing menjadi pilihan strategi yang dilakukan oleh Ukraina sebagai respon atas agresi yang dilakukan oleh Rusia.

Dalam menerapkan strategi balancing, He dan Feng (2008) menguraikan empat jenis tindakan yang bisa dilakukan suatu negara. Keempat tindakan itu meliputi military hard balancing, non-military hard balancing, military soft balancing, dan non-military soft balancing. Military hard balancing ialah tindakan di mana suatu negara berupaya meningkatkan kekuatan sendiri guna merespon negara lain yang menjadi ancaman, dengan cara memperkuat kapasitas militernya dan membentuk aliansi dengan negara lain. Sementara itu, non-military hard balancing ialah tindakan negara dalam memperkuat diri guna merespon negara lain yang menjadi ancaman, dengan cara melakukan transfer teknologi atau memberikan bantuan ekonomi pada negara-negara sekutu. Adapun military soft balancing merupakan tindakan suatu negara dalam melemahkan kekuatan negara pengancam dengan tujuan meningkatkan keamanan diri, yang dilakukan melalui upaya pengendalian senjata yang menargetkan negara pengancam dan penjualan atau pembelian senjata dari rival negara pengancam. Terakhir, non-military soft balancing ialah upaya pelemahan negara pengancam melalui pemberian sanksi ekonomi dan penerapan strategi non-kooperasi

Pilihan tindakan yang dilakukan oleh negara bergantung pada dua hal, yaitu kesenjangan kekuatan dan tingkat ketergantungan ekonomi antara negara ternacam dengan negara pengancam (He & Feng, 2008). Semakin tinggi kesenjangan kekuatan antara kedua negara, semakin kecil kemungkinan kedua negara akan memilih strategi hard balancing, begitu juga sebaliknya. Dalam konteks penelitian ini, Ukraina merupakan negara yang memiliki kesenjangan yang jauh dengan Rusia, yang membuat Rusia secara berani menerapkan strategi konfrontatif melalui serangan militer pada Februari 2022 (Pradana & Adielah, 2022). Oleh karena itu, sebagai respon atas tindakan Rusia, Ukraina kemudian menerapkan strategi *military soft balancing*, dan *non-military soft balancing* yang diwujudkan melalui pengajuan bantuan persenjataan pada NATO dan penerapan strategi non-kooperasi.

Metode

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan fokus pada analisis teks dan dokumentasi untuk memahami secara mendalam perspektif doktrin dan strategi Ukraina dalam menghadapi konflik dengan Rusia. Analisis konten akan digunakan untuk menyelidiki dokumen resmi kebijakan keamanan Ukraina, pernyataan resmi, dan literatur. Data utama akan diperoleh dari dokumen resmi pemerintah Ukraina, kebijakan keamanan nasional, pernyataan resmi dari pejabat pemerintah dan militer, serta literatur terkait yang membahas evolusi doktrin dan strategi Ukraina. Metode analisis konten adalah teknik penelitian yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasi pola atau tema dalam data tekstual, visual, atau audiovisual (Bakry, 2016). Metode ini bertujuan untuk memahami makna, konteks, dan pesan yang terkandung dalam suatu teks atau media, baik secara eksplisit maupun implisit (Yin, 2009).

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kerangka konseptual soft-balancing yang dirumuskan oleh He dan Feng (2008), Ukraina telah mengimplementasikan berbagai tindakan yang menggambarkan penerapan strategi soft-balancing dalam menghadapi ancaman dari Rusia. Dalam aspek military soft balancing, Ukraina secara aktif mengajukan permintaan bantuan persenjataan kepada NATO untuk mengimbangi kekuatan militer Rusia yang jauh lebih besar. Bantuan ini meliputi penyediaan senjata anti-tank, sistem pertahanan udara, dan amunisi, yang membantu Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya dan memperlambat kemajuan pasukan Rusia. Melalui pengajuan bantuan tersebut, Ukraina berusaha menyeimbangkan ketimpangan kekuatan militer dengan memanfaatkan dukungan eksternal tanpa secara langsung menghadapi konfrontasi militer dengan Rusia.

Selain itu, Ukraina juga menerapkan non-military soft balancing, yang terlihat dari upaya diplomatik intensif yang dilakukan oleh negara ini untuk mendapatkan dukungan politik dari NATO dan negara-negara Barat. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, secara aktif melakukan lobi-lobi dengan pemimpin negara-negara Barat untuk memperoleh komitmen politik dan dukungan nyata dalam melawan agresi Rusia. Selain itu, Ukraina juga menerapkan strategi non-kooperasi dengan menghindari keterlibatan dalam inisiatif yang dapat memperkuat posisi Rusia, sekaligus memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kepentingan untuk menahan pengaruh Rusia di kawasan tersebut.

Pengajuan Bantuan Persenjataan pada NATO

Sejak awal konflik Rusia-Ukraina pada tahun 2022, Ukraina telah mengajukan permintaan bantuan persenjataan yang signifikan kepada NATO. Hal ini merupakan bagian dari strategi soft balancing yang digunakan Ukraina untuk mengimbangi kekuatan militer Rusia (Alim, 2019). Ukraina menyadari bahwa mereka tidak dapat menang dalam pertempuran langsung melawan Rusia, sehingga mereka berusaha mendapatkan dukungan dan bantuan persenjataan dari negara-negara Barat melalui NATO.

Sejak awal invasi Rusia pada Februari 2022, NATO telah berperan sebagai salah satu pendukung utama Ukraina, dengan memberikan bantuan militer bernilai miliaran dolar. Bantuan ini mencakup berbagai jenis peralatan dan persenjataan, mulai dari senjata anti-tank, sistem pertahanan udara, amunisi, hingga perangkat militer lainnya. Dukungan tersebut menunjukkan komitmen NATO dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan Ukraina dan stabilitas kawasan. Langkah ini juga mencerminkan respons kolektif terhadap ancaman geopolitik yang lebih luas yang ditimbulkan oleh invasi Rusia terhadap tatanan internasional yang berbasis aturan (Oktorino, 2022).

Bantuan persenjataan yang disalurkan oleh NATO memainkan peran kunci dalam mendukung kemampuan Ukraina untuk bertahan di tengah serangan masif Rusia. Misalnya, senjata anti-tank seperti Javelin telah membantu Ukraina menghadapi kendaraan lapis baja Rusia dengan efektivitas yang signifikan. Sistem pertahanan udara seperti Stinger juga telah meningkatkan kemampuan Ukraina untuk menghadapi ancaman udara, yang menjadi salah satu aspek dominasi Rusia di medan perang. Selain itu, amunisi dan logistik lainnya memastikan bahwa pasukan Ukraina tetap dapat melancarkan operasi pertahanan dan serangan balasan (Amal dkk, 2022).

Dukungan militer ini tidak hanya memberikan dampak langsung di medan perang, tetapi juga menciptakan dampak strategis yang lebih luas. Pertama, bantuan NATO berhasil memperlambat laju kemajuan pasukan Rusia, yang pada awal invasi tampak memiliki momentum kuat untuk mencapai tujuannya. Sebagai contoh, upaya Rusia untuk merebut Kyiv di tahap awal invasi mengalami kegagalan, sebagian besar berkat perlawanan sengit Ukraina yang didukung oleh persenjataan modern dari NATO (Oktorino, 2022).

Kedua, bantuan ini memungkinkan Ukraina untuk mempertahankan kontrol atas wilayah-wilayah strategis dan, dalam beberapa kasus, merebut kembali wilayah yang sebelumnya diduduki pasukan Rusia. Operasi militer di wilayah Kharkiv dan Kherson, misalnya, menunjukkan efektivitas pasukan Ukraina dalam memanfaatkan dukungan militer dari NATO untuk melancarkan serangan balasan yang berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan tersebut tidak hanya bersifat defensif tetapi juga ofensif, yang membantu Ukraina menjaga kedaulatan teritorialnya (Oktorino, 2022). Ketiga, bantuan dari NATO memperkuat moral dan kepercayaan diri pasukan Ukraina. Dengan dukungan internasional yang terus mengalir, Ukraina tidak hanya mendapatkan keunggulan material tetapi juga semangat juang untuk menghadapi salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Selain itu, dukungan ini juga memberikan pesan simbolis kepada Rusia bahwa tindakan agresinya tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi (Bilefsky et. al, 2022).

Meskipun bantuan NATO memiliki banyak manfaat, ada pula tantangan yang menyertai penyalurannya. Salah satu tantangan utama adalah logistik. Ukraina menghadapi masalah dalam mendistribusikan bantuan militer ke garis depan, terutama karena infrastruktur transportasi yang rusak akibat serangan Rusia. Selain itu, keragaman sistem persenjataan yang diterima Ukraina dari berbagai negara anggota NATO sering kali menciptakan kesulitan dalam hal pelatihan dan pemeliharaan. Tantangan lain adalah keberlanjutan bantuan tersebut. Beberapa negara anggota NATO menghadapi tekanan domestik, baik dari segi politik maupun ekonomi, untuk mengurangi tingkat bantuan militer mereka. Pada sisi lain, ada kekhawatiran bahwa peningkatan dukungan militer kepada Ukraina dapat memicu eskalasi lebih lanjut dalam konflik ini. Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa dukungan NATO kepada Ukraina dianggap sebagai tindakan provokatif, yang dapat meningkatkan ketegangan antara Rusia dan aliansi Barat. Kekhawatiran ini membuat beberapa negara anggota NATO mempertimbangkan secara hati-hati jenis dan volume bantuan yang mereka berikan (Dila dkk, 2024).

Selain aspek militer, bantuan NATO kepada Ukraina juga memiliki dimensi politik yang signifikan. Dukungan ini mencerminkan solidaritas internasional terhadap Ukraina sebagai negara yang mengalami agresi, serta komitmen untuk menegakkan prinsip-prinsip kedaulatan dan integritas teritorial. Langkah NATO ini juga bertujuan untuk mempertahankan kredibilitasnya sebagai aliansi pertahanan kolektif, terutama di hadapan ancaman yang terus meningkat dari Rusia. Meskipun demikian, tindakan ini juga menghadirkan dilema diplomatik. NATO harus menyeimbangkan antara mendukung Ukraina dan menghindari konfrontasi langsung dengan Rusia yang berpotensi mengarah pada konflik berskala lebih besar. Dalam kondisi tersebut, NATO telah menegaskan bahwa dukungan mereka bersifat defensif dan bertujuan untuk melindungi kedaulatan Ukraina, bukan untuk memprovokasi Rusia (Walt, 2022).

Rusia memandang bantuan militer NATO sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanannya. Dalam beberapa pernyataan resmi, pemerintah Rusia menuduh

NATO terlibat langsung dalam konflik melalui penyediaan persenjataan dan pelatihan kepada Ukraina (Pradana & Adielah, 2022). Rusia juga merespons dengan meningkatkan intensitas serangan militernya, termasuk penggunaan serangan rudal ke infrastruktur vital Ukraina sebagai bentuk tekanan. Namun, meskipun menghadapi tekanan ini, NATO tetap konsisten dalam memberikan bantuan. Langkah ini mencerminkan keyakinan bahwa dukungan kepada Ukraina tidak hanya penting untuk menyelesaikan konflik ini, tetapi juga untuk mempertahankan stabilitas kawasan dan mencegah preseden yang dapat merugikan tatanan internasional di masa depan.

Ukraina, dengan kekuatan militernya yang lebih kecil dibandingkan Rusia, memanfaatkan hubungan dengan NATO untuk memperkuat pertahanan dan meningkatkan peluang bertahan dalam konflik ini. Strategi ini juga mencerminkan apa yang disebut sebagai *soft balancing*, di mana bantuan militer yang diberikan tidak langsung melibatkan NATO dalam pertempuran tetapi tetap memiliki dampak signifikan terhadap keseimbangan kekuatan di medan perang. Dengan demikian, langkah ini memungkinkan NATO untuk mendukung Ukraina tanpa melibatkan diri secara langsung dalam konflik bersenjata.

Permintaan Dukungan Politik pada NATO dan Negara-Negara Barat

Selain mengajukan bantuan persenjataan, Ukraina telah mengadopsi pendekatan diplomatik yang intensif untuk mendapatkan dukungan politik dari NATO dan negara-negara Barat dalam menghadapi agresi Rusia. Upaya diplomatik ini merupakan bagian integral dari strategi *soft balancing* Ukraina, yang dirancang untuk mengimbangi kekuatan Rusia dengan cara non-militer. Diplomasi memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan internasional, mengisolasi Rusia secara politik, dan memperkuat posisi Ukraina dalam konflik yang terus berlangsung.

Sejak awal invasi pada Februari 2022, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, telah menjadi wajah perjuangan Ukraina di panggung internasional. Ia telah mengadakan berbagai pertemuan tingkat tinggi dengan para pemimpin negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, dan anggota lainnya dari NATO. Melalui pidato-pidato yang penuh semangat dan retorika yang menginspirasi, Zelenskyy berhasil membangun narasi bahwa perjuangan Ukraina adalah perjuangan untuk mempertahankan prinsip-prinsip dasar tatanan internasional berbasis aturan. Hal ini berhasil menarik simpati global dan menciptakan tekanan politik terhadap Rusia (Setiyono, 2024).

Dalam konteks diplomasi multilateral, Ukraina juga aktif memanfaatkan forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (UE), dan NATO untuk memperkuat posisinya. Pada berbagai forum PBB, Ukraina telah menyerukan resolusi-resolusi yang mengutuk tindakan Rusia, dengan tujuan menarik perhatian dunia terhadap pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Rusia. Resolusi-resolusi ini meskipun tidak mengikat, memiliki nilai simbolis yang signifikan karena menunjukkan konsensus global terhadap agresi Rusia. Selain itu Ukraina juga telah mengadvokasi status kandidat keanggotaan sebagai bentuk dukungan politik yang nyata. Proses ini memperlihatkan bagaimana Ukraina menggunakan diplomasi untuk mempererat hubungan dengan kekuatan besar Eropa, yang pada akhirnya memberikan lebih banyak leverage dalam konflik. Selain itu, Ukraina juga secara aktif melibatkan NATO dalam berbagai diskusi strategis, meskipun secara formal belum menjadi anggota aliansi tersebut (Gultom dkk, 2024).

Salah satu aspek paling mencolok dari strategi diplomasi Ukraina adalah penggunaan pidato publik untuk membangun dukungan internasional. Zelenskyy sering menggunakan platform digital dan forum global untuk menyampaikan pesan-pesan yang emosional dan tegas. Pidato-pidatonya di hadapan parlemen nasional negara-negara Barat, seperti Kongres Amerika Serikat dan Parlemen Inggris, tidak hanya bertujuan untuk memperoleh bantuan materi tetapi juga untuk membangun solidaritas politik dan moral. Dalam pidato-pidatonya, Zelenskyy sering menggunakan analogi historis yang relevan bagi audiensnya. Misalnya, dalam pidatonya di hadapan parlemen Inggris, ia membandingkan perjuangan Ukraina dengan perlawanan Inggris terhadap Nazi selama Perang Dunia II. Pendekatan ini tidak hanya membangkitkan simpati tetapi juga menciptakan rasa tanggung jawab kolektif di antara para pemimpin Barat untuk mendukung Ukraina (Bisri & Febriana, 2024).

Upaya diplomatik Ukraina tidak hanya berfokus pada aspek politik tetapi juga pada aspek ekonomi. Ukraina telah berulang kali menyerukan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Rusia, termasuk pembatasan impor energi dan pembekuan aset para oligarki Rusia. Hasilnya, beberapa negara Barat, terutama Amerika Serikat dan Uni Eropa, telah memberlakukan sanksi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia. Selain itu, Ukraina juga berhasil mengamankan komitmen bantuan ekonomi dari negara-negara Barat. Bantuan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas internal Ukraina di tengah konflik, termasuk dalam hal penyediaan layanan dasar bagi warganya. Dukungan ekonomi juga berfungsi sebagai pengingat kepada Rusia bahwa agresinya memiliki konsekuensi jangka panjang yang dapat merusak perekonomiannya sendiri (Dila dkk, 2024). Secara umum, penerapan strategi *soft balancing* Ukraina melalui permintaan dukungan politik pada NATO dan negara-negara Barat bertujuan untuk meningkatkan tekanan internasional terhadap Rusia dan mempersulit posisi Rusia dalam konflik. Dengan mendapatkan dukungan politik yang kuat, Ukraina berharap dapat memaksa Rusia untuk menarik pasukannya dan mencapai solusi yang menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya (Patnaik, 2020).

Ukraina tentunya tidak akan kesulitan mendapatkan dukungan dari NATO, mengingat sejak 12 Juni 2020, Ukraina secara resmi telah menjadi bagian dari *Enhanced Opportunities Program* (EOP) NATO. Keterlibatan Ukraina dalam NATO EOP bukan hanya sebatas tindakan praktis untuk meningkatkan kapabilitas militer, tetapi juga langkah strategis untuk mendekatkan diri dengan NATO. Ini memberikan Ukraina keuntungan diplomatis dan keamanan dalam menghadapi ancaman dari Rusia, menunjukkan komitmen Ukraina terhadap integrasi dengan struktur keamanan Eropa. *Enhanced Opportunities Program* merupakan inisiatif NATO yang dirancang untuk memperkuat kerjasama praktis dan meningkatkan interoperabilitas antara negara-negara mitra dan anggota aliansi. Bagi Ukraina, menjadi anggota EOP memberikan lebih dari sekadar keuntungan militer; ini menciptakan panggung strategis untuk meningkatkan hubungan dengan aliansi NATO dan memperluas kerja sama keamanan (Fisher, 2021).

Secara strategis, keterlibatan Ukraina dalam EOP menggambarkan komitmen yang kuat untuk mendekatkan diri dengan NATO. Ini menandai langkah penting dalam upaya Ukraina untuk mengintegrasikan dirinya dengan struktur keamanan Eropa dan memperkuat kemitraan dengan aliansi yang telah lama diinginkan. Melalui partisipasinya dalam program ini, Ukraina menunjukkan niatnya untuk mengadopsi standar NATO, meningkatkan interoperabilitas militer, dan berpartisipasi secara lebih efektif dalam latihan dan operasi bersama. Keterlibatan dalam

EOP juga menciptakan hubungan yang lebih erat antara Ukraina dan anggota NATO. Dengan menjadi anggota program ini, Ukraina mendapatkan akses lebih besar ke latihan militer yang lebih kompleks dan berbagai sumber daya keamanan NATO. Ini tidak hanya memberikan Ukraina kesempatan untuk meningkatkan ketrampilan militer dan kapabilitas pertahanan mereka, tetapi juga membuka pintu untuk lebih banyak dialog politik dan koordinasi strategis (Alim, 2019).

Selain itu, langkah ini memiliki dampak diplomatik yang signifikan. Keterlibatan Ukraina dalam EOP memperkuat pesannya kepada dunia bahwa negara ini berkomitmen untuk membangun hubungan yang kuat dengan aliansi NATO dan berperan aktif dalam menjaga keamanan regional. Ini juga dapat diartikan sebagai respons terhadap ancaman keamanan yang terus berkembang di wilayah tersebut, menunjukkan tekad Ukraina untuk bersama-sama dengan mitra internasional dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Namun, keterlibatan Ukraina dalam EOP juga tidak terlepas dari konteks geopolitik yang rumit. Rusia, sebagai negara tetangga dan pihak yang terlibat langsung dalam konflik Ukraina-Rusia, seringkali menanggapi langkah-langkah seperti ini dengan kekhawatiran dan protes. Oleh karena itu, langkah Ukraina ini tidak hanya merupakan upaya untuk memperkuat keamanan nasional, tetapi juga mengandung elemen diplomasi yang cermat dalam menavigasi dinamika hubungan regional yang kompleks (Walt, 2022).

Semakin menguatnya hubungan Ukraina dengan NATO telah menjadi fokus perhatian dalam konteks konflik Ukraina-Rusia dan perubahan dalam dinamika keamanan regional. Keterlibatan Ukraina dengan NATO, terutama melalui berbagai program dan inisiatif, telah menciptakan dampak signifikan dalam beberapa aspek hubungan tersebut. Pertama-tama, keterlibatan ini memperkuat koneksi militer antara Ukraina dan aliansi NATO. Melalui program seperti EOP, Ukraina memperoleh akses lebih besar ke latihan militer dan pertukaran informasi, meningkatkan interoperabilitas militer, dan memperdalam kemitraan praktis dengan anggota NATO (Ayudia dkk, 2022). Selain itu, menguatnya hubungan Ukraina dengan NATO terlihat dalam konteks dukungan politik dan diplomasi. Aliansi NATO memberikan dukungan politik terhadap Ukraina melalui pernyataan solidaritas dan tindakan konkret, yang menciptakan dasar diplomasi yang kuat antara Ukraina dan anggota NATO. Pada gilirannya hal ini semakin memperkuat posisi Ukraina dalam upaya untuk mendapatkan dukungan internasional dalam konfliknya dengan Rusia dan membangun fondasi untuk kerjasama lebih lanjut dalam menghadapi tantangan keamanan bersama.

Secara keseluruhan, menguatnya hubungan Ukraina dengan NATO menciptakan langkah-langkah yang positif dalam menghadapi tantangan keamanan, memperkuat kemitraan strategis, dan meningkatkan posisi Ukraina dalam arena internasional. Sementara itu, dampak ini juga menjadi faktor dalam dinamika geopolitik yang kompleks, menciptakan tantangan dan peluang seiring dengan perubahan dinamika keamanan global. NATO sendiri telah lama menjadi mitra strategis bagi Ukraina dalam upaya mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya. Hubungan kemitraan ini diperkuat setelah Ukraina menjadi “Mitra untuk Perdamaian” NATO pada tahun 1994 (Hara, 2011). Keanggotaan Ukraina dalam program ini memungkinkan negara tersebut untuk berpartisipasi dalam misi-misi NATO, serta menerima bantuan teknis dan pelatihan militer. Selain itu, NATO juga telah mendukung reformasi sektor pertahanan Ukraina, termasuk upaya untuk meningkatkan interoperabilitas militer dengan anggota NATO. Dukungan

ini diberikan melalui program-program seperti “Komisi NATO-Ukraina” dan “Rencana Tindakan Kemitraan NATO-Ukraina” (Berryman, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa Ukraina telah menjadi mitra strategis yang penting bagi NATO, khususnya dalam konteks konflik dengan Rusia.

Meskipun demikian, tindakan yang dilakukan Ukraina tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga keberlanjutan dukungan dari negara-negara Barat. Meskipun banyak negara telah menunjukkan solidaritas yang kuat, ada tekanan domestik di beberapa negara untuk mengurangi tingkat bantuan, terutama karena dampak ekonomi dari konflik ini. Misalnya, kenaikan harga energi di Eropa sebagai akibat dari pembatasan impor gas Rusia telah memicu perdebatan tentang sejauh mana negara-negara Eropa dapat terus mendukung Ukraina tanpa merugikan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Selain itu, Ukraina juga menghadapi tantangan dalam menghadapi narasi Rusia yang mencoba menggambarkan konflik ini sebagai perjuangan melawan ekspansi NATO. Rusia telah menggunakan propaganda untuk membangun citra bahwa NATO dan negara-negara Barat adalah ancaman terhadap kedaulatan Rusia. Meskipun narasi ini kurang berhasil di tingkat internasional, pengaruhnya masih terasa di beberapa wilayah, termasuk negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi atau politik dekat dengan Rusia.

Penerapan Strategi Non-Kooperasi

Selain pengajuan bantuan persenjataan dan permintaan dukungan politik, Ukraina juga telah menerapkan strategi non-kooperasi sebagai bagian dari strategi soft balancing dalam konflik dengan Rusia. Strategi ini bertujuan untuk mempersulit posisi Rusia dan meningkatkan biaya yang harus ditanggung Rusia dalam melakukan invasi. Salah satu bentuk utama dari strategi non-kooperasi yang diterapkan Ukraina dalam konflik dengan Rusia adalah penolakan untuk bernegosiasi dalam kondisi yang dianggap merugikan bagi kepentingan nasional mereka. Sejak awal invasi Rusia pada 2022, Ukraina menegaskan sikap tegasnya dengan menolak berbagai tawaran yang berpotensi merugikan integritas teritorial dan kedaulatannya. Salah satu poin utama dalam penolakan ini adalah keengganan Ukraina untuk mengakui atau menyerah pada klaim Rusia atas wilayah-wilayah yang telah mereka duduki, seperti Krimea dan Donbas (Oktorino, 2022).

Ukraina menolak untuk mengakui kedaulatan Rusia atas Krimea, yang telah dianeksasi secara sepihak oleh Rusia pada tahun 2014. Bagi Ukraina, Krimea adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah mereka, dan setiap negosiasi yang melibatkan pengakuan atas klaim Rusia terhadap Krimea dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum internasional, terutama mengenai integritas wilayah dan kedaulatan negara. Meskipun Rusia secara konsisten menegaskan bahwa Krimea adalah bagian dari Federasi Rusia, Ukraina tetap berpendirian bahwa penyerahan atau pengakuan terhadap aneksasi tersebut tidak dapat dibenarkan, baik secara hukum maupun moral (Bilefsky et. al, 2022).

Selain Krimea, Ukraina juga menolak klaim Rusia terhadap wilayah-wilayah di Donbas, yang terdiri dari dua wilayah terpisah, Luhansk dan Donetsk, yang telah diduduki oleh kelompok separatis yang didukung Rusia sejak 2014. Seiring dengan eskalasi konflik pada 2022, Rusia berupaya memperkuat klaimnya atas wilayah tersebut, tetapi Ukraina dengan tegas menolak setiap bentuk kompromi yang melibatkan pengakuan atau pemberian otonomi kepada kelompok

separatis yang dianggap sebagai ancaman terhadap integritas negara dan sistem politik mereka. Ukraina menganggap bahwa memberikan konsesi atau mengakui wilayah yang diduduki oleh Rusia atau kelompok pro-Rusia akan menciptakan preseden yang berbahaya bagi keamanan nasional dan kedaulatan negara-negara lain yang mungkin terancam oleh ambisi ekspansionis negara besar seperti Rusia (Walt, 2022).

Penolakan Ukraina untuk bernegosiasi dalam kondisi yang merugikan ini merupakan bagian dari strategi non-kooperasi yang lebih besar, yang berfokus pada pembatasan ruang bagi Rusia untuk mencapai tujuannya melalui kekuatan dan ancaman. Ukraina berusaha untuk tidak memberi Rusia kesempatan untuk memperoleh keuntungan politik atau teritorial melalui negosiasi yang tidak seimbang, di mana pihak Ukraina harus mengorbankan kepentingan fundamental mereka. Sikap ini juga mengirimkan pesan kuat kepada komunitas internasional bahwa Ukraina tidak akan tunduk pada paksaan atau ancaman yang bertujuan meruntuhkan kedaulatan negara mereka.

Secara lebih luas, strategi non-kooperasi Ukraina ini juga mencerminkan pemahaman mereka terhadap ketimpangan kekuatan dengan Rusia, di mana Ukraina menyadari bahwa untuk melindungi kedaulatannya, mereka harus meminimalkan interaksi yang memungkinkan Rusia untuk memaksakan kehendaknya tanpa biaya politik yang signifikan. Dengan menolak untuk melakukan negosiasi yang merugikan, Ukraina berharap dapat mendorong lebih banyak tekanan internasional terhadap Rusia, baik melalui sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, maupun dukungan politik yang lebih kuat dari negara-negara Barat dan komunitas internasional secara umum.

Selain itu, strategi ini juga membantu Ukraina untuk menjaga narasi bahwa mereka adalah pihak yang sah dan tidak dapat dipaksa untuk menerima klaim wilayah yang tidak sah. Dalam konteks ini, Ukraina berusaha untuk menjaga solidaritas dengan sekutunya dan memperkuat posisi mereka di forum internasional, termasuk di PBB dan NATO, dengan menunjukkan keteguhan mereka dalam mempertahankan integritas negara dan menghormati hukum internasional. Penolakan untuk bernegosiasi dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini juga memungkinkan Ukraina untuk menjaga rasa percaya diri dalam perjuangan mereka dan menunjukkan bahwa mereka akan terus berjuang demi kebebasan dan kemerdekaan, meskipun dihadapkan dengan tantangan besar.

Secara keseluruhan, strategi non-kooperasi yang diterapkan oleh Ukraina ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bergantung pada kekuatan militer untuk membela diri, tetapi juga pada kemampuan diplomatik dan kebijakan luar negeri yang cerdas untuk mengurangi pengaruh Rusia dan memobilisasi dukungan internasional. Dengan menolak untuk mengakui klaim Rusia atas wilayah-wilayah yang diduduki, Ukraina tetap berkomitmen untuk mempertahankan prinsip-prinsip kedaulatan, integritas wilayah, dan hukum internasional, yang menjadi dasar perjuangan mereka dalam menghadapi agresi Rusia.

Selain menerapkan strategi non-kooperasi dalam bidang diplomatik dan militer, Ukraina juga telah mengimplementasikan strategi non-kooperasi yang signifikan di bidang ekonomi untuk memperburuk posisi Rusia dan mengurangi ketergantungan ekonomi Ukraina terhadap negara tersebut. Salah satu langkah yang paling menonjol dalam hal ini adalah penolakan Ukraina untuk membayar utang kepada Rusia dan menghentikan pembayaran untuk pasokan gas Rusia. Tindakan ini bukan hanya merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Rusia, tetapi juga

langkah strategis yang bertujuan untuk merusak perekonomian Rusia, sekaligus memperkuat posisi Ukraina dalam konflik yang sedang berlangsung.

Penolakan untuk membayar utang kepada Rusia dapat dipandang sebagai salah satu upaya untuk memutuskan hubungan ekonomi yang selama ini mempererat ketergantungan Ukraina terhadap Rusia. Sejak periode pasca-Soviet, Ukraina memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat dengan Rusia, termasuk dalam hal perdagangan energi, khususnya gas alam (Hanifah, 2017). Namun, setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2014 dan aneksasi Krimea, ketegangan yang meningkat antara kedua negara tersebut memaksa Ukraina untuk meninjau kembali kebijakan ekonominya (Muhammad, 2015). Meskipun terdapat kesulitan besar dalam mengurangi ketergantungan tersebut, Ukraina mulai mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk menjauhkan diri dari Rusia (Kartini, 2014).

Salah satu tindakan yang diambil oleh Ukraina adalah penolakan untuk membayar utang yang dimiliki terhadap Rusia. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tekanan terhadap perekonomian Rusia, yang bergantung pada pembayaran utang internasional dan pendapatan yang dihasilkan dari pasokan energi. Dengan menolak untuk memenuhi kewajiban utangnya, Ukraina mengurangi pemasukan yang bisa diperoleh Rusia dari Ukraina, yang selama ini berkontribusi pada ekonomi Rusia, terutama dalam sektor energi dan perdagangan. Tindakan ini menunjukkan bahwa Ukraina tidak hanya bersikap pasif dalam menghadapi ancaman Rusia, tetapi juga berusaha menggunakan instrumen ekonomi untuk memberi dampak langsung pada posisi ekonomi Rusia.

Selain penolakan untuk membayar utang, Ukraina juga menghentikan pembayaran untuk pasokan gas dari Rusia. Rusia, sebagai salah satu negara penghasil gas terbesar di dunia, telah menjadi pemasok utama gas ke Ukraina, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik dan sebagai bagian dari jaringan distribusi gas Eropa. Namun, sejak dimulainya konflik pada 2014, Ukraina berusaha untuk mengurangi ketergantungannya terhadap gas Rusia (Harding & Walker, 2014). Dengan menghentikan pembayaran atas pasokan gas, Ukraina secara langsung memutuskan hubungan ekonomi vital yang selama ini menjadi tulang punggung bagi kedua negara tersebut. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Ukraina berusaha untuk mengurangi pengaruh ekonomi Rusia dalam perekonomiannya, yang menjadi bagian dari strategi mereka untuk menjaga kedaulatan dan independensi.

Langkah-langkah tersebut jelas bertujuan untuk mempersulit posisi ekonomi Rusia dengan mengurangi aliran pembayaran yang vital bagi perekonomian Rusia. Dengan memotong akses Rusia ke salah satu pasar energinya yang paling penting, Ukraina berharap dapat menambah tekanan internasional terhadap Rusia, yang pada gilirannya akan memperburuk situasi ekonomi Rusia. Secara bersamaan, langkah-langkah ini mengurangi ketergantungan Ukraina pada energi Rusia, yang telah lama menjadi masalah struktural dalam hubungan kedua negara. Ukraina mencari alternatif pasokan energi dari negara-negara lain, seperti gas alam dari Eropa dan energi terbarukan, yang semakin mengurangi ketergantungan mereka terhadap Rusia.

Namun, meskipun strategi non-kooperasi ini memberikan dampak bagi perekonomian Rusia, langkah tersebut juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Ukraina. Menghentikan pembayaran gas dan utang dapat memperburuk hubungan ekonomi Ukraina dengan Rusia dan negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dekat dengan Rusia. Ukraina harus mencari sumber daya alternatif untuk menggantikan energi yang sebelumnya dipasok oleh

Rusia, yang dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan ketidakstabilan sementara dalam perekonomian Ukraina. Selain itu, meskipun Ukraina berhasil memutuskan ketergantungannya terhadap Rusia, ketidakpastian dalam jangka panjang mengenai pasokan energi dan pemulihan ekonomi tetap menjadi tantangan besar bagi negara tersebut.

Namun, langkah-langkah ini mencerminkan strategi Ukraina untuk mengurangi pengaruh ekonomi Rusia dan menegaskan bahwa mereka akan berjuang untuk kebebasan politik dan ekonomi. Dalam konteks ini, strategi non-kooperasi di bidang ekonomi tidak hanya berfungsi untuk melawan kekuatan militer Rusia, tetapi juga sebagai cara untuk memperburuk posisi Rusia di arena internasional, dengan harapan dapat meraih dukungan lebih besar dari negara-negara Barat dan komunitas internasional. Ini juga menjadi simbol perlawanan Ukraina terhadap dominasi Rusia dalam aspek politik dan ekonomi, serta komitmennya untuk tidak tunduk pada ancaman yang dihadapi.

Secara keseluruhan, strategi non-kooperasi Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina merupakan bagian dari upaya *soft balancing* untuk mengimbangi kekuatan Rusia. Dengan menolak untuk bernegosiasi dalam kondisi yang merugikan, menghambat kemajuan pasukan Rusia, dan menerapkan strategi ekonomi yang merugikan Rusia, Ukraina berusaha untuk meningkatkan biaya dan mempersulit posisi Rusia dalam konflik (Patnaik, 2020). Meskipun strategi non-kooperasi ini telah memberikan beberapa hasil positif bagi Ukraina, seperti memperlambat kemajuan Rusia dan meningkatkan biaya invasi, namun Ukraina tetap menghadapi tantangan yang berat. Rusia tetap memiliki keunggulan militer yang signifikan dan terus melakukan serangan yang brutal terhadap Ukraina. Oleh karena itu, Ukraina perlu terus memperkuat strategi *soft balancing* dengan dukungan internasional yang lebih luas agar dapat mencapai tujuan strategisnya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, tulisan ini sampai pada simpulan bahwa dalam merespon serangan militer yang dilancarkan Rusia sejak Februari 2022, Ukraina menerapkan strategi *soft balancing*, baik yang bersifat militer maupun non-militer, yang dapat dilihat dari pengajuan bantuan persenjataan pada NATO, permintaan dukungan politik pada NATO dan negara-negara Barat, serta penerapan strategi non-kooperasi. Penerapan strategi *soft balancing* Ukraina dalam konflik Rusia-Ukraina pada akhirnya berhasil membuat negara-negara NATO memberikan bantuan militer dan dukungan politik terhadap Ukraina. Bantuan NATO kepada Ukraina sejak 2022 menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan kedaulatan Ukraina dan memperlambat kemajuan pasukan Rusia. Meskipun menghadapi tantangan logistik, politis, dan diplomatik, dukungan ini menunjukkan pentingnya solidaritas internasional dalam menghadapi agresi. Selain itu, langkah ini juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana negara-negara kecil dapat menggunakan strategi *balancing* untuk menghadapi ancaman dari kekuatan yang lebih besar.

Studi lebih lanjut tentang strategi *soft balancing* penting untuk dilakukan guna memahami bagaimana negara-negara kecil dapat mengatasi ancaman dari kekuatan besar melalui pendekatan diplomatik. Dengan mempelajari pengalaman Ukraina, akan diperoleh wawasan tentang bagaimana suatu negara memanfaatkan *soft balancing* untuk mengelola konflik internasional di masa depan. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat difokuskan untuk melihat efektifitas

penerapan strategi *soft balancing* yang dilakukan Ukraina atau negara-negara kecil lain ketika menghadapi konflik dengan engara besar. Lebih jauh, peneliti selanjutnya juga dapat mengelaborasi atau menelaah lebih jauh faktor ketergantungan ekonomi, yang oleh He dan Feng, disebut sebagai faktor yang mempengaruhi pilihan strategi balancing yang dapat dilakukan oleh suatu negara.

Referensi

- Amal, M. T., Muhammad, A., & Mukti, T. A. (2022). Intervensi Politik dan Militer Rusia Terhadap Ukraina Sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterens. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 262–273. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.21941>
- Alim, E. (2019). A Comparative Analysis of the Ukraine Crisis Through the Prisms of Offensive Realist and Liberal Internationalist Theories, *Journal of Management Economics Literature Islamic and Political Sciences*, 4(1), pp. 75–99. doi: 10.24013/jomelips.559158.
- Ayudhia, L., Yuniarti., & Wirawan, R. (2022). Amerika Serikat dalam Rivalitas Ukraina-Rusia: Intervensi pada Konflik Krimea dan Laut Azov. *Interdependence Journal of International Studies* 3 (1). Universitas Mulawarman.
- Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Berryman, J. (2015) —Russian Grand Strategy and the Ukraine Crisis: An Historical Cut, ll in Kanet, R. E. and Sussex, M. (eds.) *Power, Politics, and Confrontation in Eurasia*. 1st ed. London: Palgrave Macmillan, pp. 186–209.
- Bilefsky, D., Nagourney, E. and Perez-Pefia, R. (2022) The Roots of the Ukraine War : How the Crisis Developed. *The New York Times*. Available at: <https://www.nytimes.com/article/russia-ukraine-nato-europe.htm> (Accessed: May 4, 2022).
- Bisri, M. H., & Febriana, P. (2024). Analysis of Online Media Framing in the Russia-Ukraine Conflict: Comparison of BBC Indonesia and CNN Indonesia. *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, Vol. 16, No. 1. <https://doi.org/10.21070/ijccd.v16i1.1170>.
- Dila, N. A., Azmina, F., Manurung, R. A., & Tarina, D. D. Y. (2024). Perjuangan Ukraina dalam Mempertahankan Kemerdekaan Pasca Konflik dengan Rusia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 8(7), 11–20. <https://doi.org/10.3783/causa.v8i7.7469>
- Fisher, M. (2021) Everything You Need To Know About 2014 Ukraine Crisis, Vox.com. Available at: <https://www.protocol.com/metaverse-meaning?rebelltitem=1#rebelltitem1> (Accessed: May 7, 2022).
- Gultom, Y. S., Alyanisa, R., Zakiah, H., & Kuncoro, A. I. (2024). Mengapa Reformasi Dewan Keamanan PBB Sulit Dilakukan? Telaah Realisme Pada Kasus Perang Rusia-Ukraina. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 5 (2).
- Hanifah, U. R. N. M. (2017). Embargo Ekonomi sebagai Strategi Konfrontasi Uni Eropa terhadap Rusia pada Masa Konflik Ukraina 2013-2015. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 3(2), 169–195. <https://doi.org/10.22219/sospol.v3i2.506>.
- Hara, A. E. (2011) *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri, Dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Penerbit Nuansa.

- Harding, L. and Walker, S. (2014) Crimea Applies to be Part of Russian Federation after Vote to Leave Ukraine, *Guardian*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2014/mar/17/ukraine-crimea-russia-referendum-complain-result> (Accessed: May 11, 2022).
- Hariyanto, Puguh. 2022. "NATO Dan EU. Sejauh Apa Bantuan Mereka ke Ukraina?". <https://nasional.sindonews.com/read/717397/18/nato-dan-eu-sejauh-apa-bantuan-mereka-terhadap-ukraina-1647662616?showpage=all>. Di akses 20 Maret 2022
- He, K., & Feng, H. (2008). If Not Soft Balancing, Then What? Reconsidering Soft Balancing and U.S. Policy Toward China. *Security Studies*, 17(2), 363–395. <https://doi.org/10.1080/09636410802098776>
- Kartini, Indriana. 2014. "Aneksasi Rusia di Krimea dan Konsekuensi di Ukraina". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. No. 1 11 (hlm. 27 – 41). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Kirby, Paul. 2022. "Mengapa Rusia Menyerbu Ukraina, Apa Yang Diinginkan Putin, dan Akankah Rusia Mengakhiri Perang?". <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-60507911>. Diakses 14 Maret 2022.
- Kompas.com. 2022. "Serangan Rusia Ukraina. Siapa Pendukung Mereka?". <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/25/130000565/serangan-rusia-ke-ukraina-siapa-negara-pendukung-mereka-?page=3> Di akses 14 maret2022
- Kompas.com. 2022. "Perbandingan Kekuatan Militer Rusia Vs Ukraina: Tentara Hingga Tank". <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/27/060000565/perbandingan-kekuatan-militer-rusia-vs-ukraina--tentara-hingga-tank?page=all> di akses 20/03/22
- Kurnia, Tommy. Penyebab perang Rusia Ukraina 2022. "Tiga Alasan Yang Jadi Penyebab Rusia vs Ukraina" <https://www.liputan6.com/global/read/4896728/3-alasan-yang-jadi-penyebab-perang-rusia-vs-ukraina>. Diakses pada 14 Maret 2022.
- Muhammad, A. (2015). "Selamat Datang Perang Dingin!" Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat. *INSIGNIA: Journal of International Relations*, 2(02), 1–11.
- Oktorino, Nino. 2022. *Ukraina: The Road to Armageddon*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Patnaik, A. (2020) —The Disintegration of the Soviet Union and Rise of Capitalism in Russia, *International Journal of Law Managements and Humanities*, 3(4), pp. 750759.
- Pradana, H. A., & Adielah, U. (2022). Strategi Konfrontatif Rusia Melalui Kebijakan Operasi Militer Khusus ke Ukraina. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 274–283. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.23258>.
- Pradana, H. A ., & Ramadhoan, R. I. (2022). Strategi Konfrontatif NATO Terhadap Rusia di Negara-Negara Baltik dan Polandia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Fajar*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.47354/jjihif.v1i1.438>.
- Setiyono, A. (2024). Dinamika Strategi Pertahanan Rusia Melalui Perang Hibrida (Hybrid Warfare) Dalam Konflik Dengan Ukraina Tahun 2020 - 2023. *Diplomacy and Global Security Journal: Jurnal Mahasiswa Magister Hubungan Internasional*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/dgsj.v1i1.2902>
- Walt, S. (1985) Alliance Formation and Balance of Power. *International Security*, 9(4), 3-43.

- Walt, S. (2022) An International Relations Theory Guide to the War in Ukraine, *Foreign Policy*. Available at: <https://foreignpolicy.com/2022/03/08/an-international-relations-theory-guide-to-ukraines-war>
- Yin, R. K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods (3rd Ed)*. In Sage Publication.